

**PENGARUH JUMLAH KENDARAAN, JUMLAH PASAR DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP RETRIBUSI DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI**

**Afing Rahayu¹
I Ketut Sudiana²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: afingrh@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawa implikasi kepada pemerintahan daerah didalam penyelenggaraan tugas daerahnya yang dibiayai atas beban APBD. Pemberlakuan desentralisasi menjadikan peranan dan sumbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan berkurang. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh jumlah kendaraan, jumlah pasar, dan jumlah penduduk secara simultan terhadap retribusi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh jumlah kendaraan, jumlah pasar, dan jumlah penduduk secara parsial terhadap retribusi daerah Kabupaten Kota/Provinsi Bali, dan (3) menganalisis pengaruh jumlah penduduk dalam memoderasi pengaruh jumlah kendaraan dan jumlah pasar terhadap retribusi daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan 54 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan teknik analisis moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kendaraan, jumlah pasar, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali; jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali; jumlah pasar berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap retribusi daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali; jumlah penduduk secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap retribusi daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali; jumlah penduduk memoderasi pengaruh jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dan jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh jumlah pasar terhadap retribusi daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kata Kunci: Retribusi Daerah, Kendaraan, Pasar, Penduduk

ABSTRACT

Regional autonomy and fiscal decentralization policies that refer to Law no. 32 of 2004 concerning regional government has had implications for regional government in the implementation of regional tasks which are financed at the expense of the APBD. The aim of this research is (1) analyzing the effect of the number of vehicles, the number of markets, and the number of population simultaneously on the regional retribution for the Regency/City of Bali Province, (2) to analyze the effect of the number of vehicles, the number of markets, and the number of population partially on the regional retribution of the City / Province of Bali, and (3) to analyze the effect of the population in moderating the effect of the number of vehicles and the number of markets on the local fees in the Regency / City of Bali Province The data used are secondary data, with 54 observations. The analysis technique used is the Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that the number of vehicles, the number of markets, and the number of population simultaneously had a significant effect on the local retribution in the Bali Province; the number of vehicles has a positive and significant effect on the local levies in the Regency / City of Bali Province; the number of markets has a positive but insignificant effect on the local fees for the Bali Province; total population partially has a negative and significant effect on the regional levies in the Bali Province; total population moderates the effect of the number of vehicles on the regional levies in the Regency / City of Bali Province, and the population is not able to moderate the effect of the number of markets on the regional levies in the Regency/City of Bali Province.

Keywords: Regional Retribution, Vehicles, Markets, Population

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD.

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional (Haw, 2009:147). Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2002;102). Dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal salah

satunya adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Menurut Uppun (2016) otonomi daerah adalah sistem yang memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk merencanakan, menentukan prioritas dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan kemampuan daerahnya. Kebijakan otonomi daerah itu dimaksudkan untuk semakin mendekatkan pemerintahan kepada masyarakatnya agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (Suartha, 2016).

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Fungsi pemerintah tertentu dilimpahkan kepada pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD sehingga pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban terhadap pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal di Negara Indonesia berusaha untuk mempromosikan pemerataan dengan mengatasi ketidakseimbangan vertikal dan horizontal dan dengan memberikan pemerintah pusat dan kabupaten dengan insentif untuk pengembangan pembangunan (Irawan, 2015).

Pemanfaatan modal sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi (Chatterjee, 2005). Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan-pendapatan daerah yang khususnya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Infrastruktur fisik seperti transportasi dan infrastruktur telekomunikasi yang

sebagai modal-modal sosial masyarakat merupakan infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi selain retribusi daerah (Bratamanggala, 2017). Menurut Herranz (2007) investasi infrastruktur memiliki peran yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah juga perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal utama yang selalu diusahakan oleh pemerintah di negara berkembang (Kaur dan Singh, 2016). Pertumbuhan ekonomi diawali dengan meningkatnya output barang dan jasa (Seran, 2017). Retribusi daerah adalah salah satu penerimaan yang mendasari pendapatan asli daerah pada suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi daerah digambarkan oleh perkembangan produk domestik regional bruto (Taufik, 2014). Menurut Ghosh (2008) pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan cara meningkatkan pendapatan nasional lebih cepat daripada utang publik.

Menurut Sinclair (1998) bahwa pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perkapita dan pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk mempromosikan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan efek pendapatan, yaitu meningkatkan pendapatan, menciptakan peluang kerja, dan menghasilkan efek pengganda yang dihasilkan dari peningkatan pendapatan (Permadi, 2018). Pendapatan yang memicu pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari sektor pajak maupun retribusi daerah. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi maka pemerintah negara berkembang harus fokus pada kebijakan ekonomi (Ekanayake, 2012).

Mengacu pada revisi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 dan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri.

Daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Putriani, 2016). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Retribusi daerah di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali berasal dari; (1) retribusi jasa umum, (2) retribusi jasa usaha, dan (3) retribusi perizinan tertentu (BPS Provinsi Bali, 2013).

Retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengevaluasi hasil pembangunan (Fajrii, dkk. 2016). Menurut Rimbawan (2012) selain untuk mengevaluasi hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan nasional ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan *multiplier effect* terhadap sendi-sendi kehidupan seperti lingkungan ekonomi dan sosial budaya masyarakat (Suartha, dkk. 2017). Menurut Gurluk (2009) pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kuat dengan pembangunan manusia, yaitu pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber daya untuk memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam pembangunan manusia.

Retribusi jasa umum di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan retribusi pengujian kapal perikanan (BPS Provinsi Bali, 2013).

Retribusi jasa usaha di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesinggahan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi

tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Dan retribusi perizinan tertentu di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek (BPS Provinsi Bali, 2013).

Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan Peraturan Pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Beberapa jenis perizinan tertentu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Tabel 1 penerimaan retribusi daerah Provinsi Bali berfluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 retribusi daerah Provinsi Bali terjadi penurunan, sedangkan pada tahun 2019 retribusi daerah mengalami peningkatan. Peningkatan retribusi daerah tersebut disebabkan karena Provinsi Bali merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara yang bisa dikelola oleh daerah yang pastinya berbanding terbalik dengan daerah yang masih terpencil dan tidak memiliki potensi pariwisata yang dapat dikelola oleh suatu daerah tersebut.

Penurunan retribusi daerah di tahun 2017 disebabkan karena naiknya status Gunung Agung menjadi awas, sehingga mengganggu perekonomian Provinsi Bali.

Tabel 1 Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016-2019

Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (juta rupiah)			
	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	10,241	9,191	9,669	9,863
Kab. Tabanan	22,397	20,410	29,213	29,920
Kab. Badung	104,699	101,133	135,908	148,048
Kab. Gianyar	40,756	39,281	49,427	98.622
Kab. Klungkung	22,095	22,978	22,707	39,891
Kab. Bangli	22,054	28,285	21,326	36,441
Kab. Karangasem	11,236	12,579	13,199	13,046
Kab. Buleleng	18,359	20,487	19,056	19,871
Kota Denpasar	46,925	35,030	30,904	29,464
Provinsi Bali	298,762	289,374	311,409	326,643

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019 (data diolah)

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Upaya menciptakan kemandirian daerah, PAD menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut dalam rangka memaksimalkan PAD. Upaya menciptakan kemandirian daerah, PAD menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan

sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kemandirian PAD bagi Daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD.

Tabel 2 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun 2011-2019

Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi (%)
2011	133.346.755.011,00	1.723.807.096.000,00	7,736
2012	159.400.177.012,00	2.042.091.096.000,00	7,806
2013	212.582.872.013,00	2.529.976.147.000,00	8,403
2014	255.437.831.014,00	2.920.416.697.000,00	8,747
2015	267.093.904.015,00	3.041.266.607.000,00	8,782
2016	298.762.000.000,00	3.041.195.258.000,00	9,823
2017	188.241.000.000,00	3.398.472.278.000,00	5,538
2018	331.409.000.000,00	3.718.499.635.000,00	8,912
2019	425.166.000.000,00	3.588.000.000.000,00	11,849

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2019 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD berfluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2017 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terjadi penurunan. Penurunan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Bali pada tahun 2017 terjadi karena penurunan pendapatan daerah yang disebabkan oleh status Gunung Agung yang berakibat melemahnya perekonomian Provinsi Bali kemudian berdampak pada rendahnya penerimaan retribusi daerah.

Perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat dilalui. Kendala yang sering dihadapi pemerintah untuk meningkatkan retribusi daerah dimana masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi daerah serta nihilnya dari hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pemerintah hendaknya melakukan penyempurnaan pengelolaan retribusi daerah yang berkaitan dengan perencanaan, sistem, dan prosedur pelaksanaan pemungutan

pelaporan dan pengawasan serta koordinasi antar instansi pengelola retribusi daerah.

Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Objek-objek retribusi adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah (BPS, 2013). Ratwono (2008) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian Ratwono (2008) jumlah kendaraan berpengaruh positif signifikan terhadap retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan jumlah kendaraan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi penerimaan retribusi daerah karena dengan melihat pada jumlah kendaraan tentu akan memberikan peluang untuk pemungutan retribusi misalnya pada retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi ijin trayek dan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Rosalina, 2015).

Jumlah penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Suyatmo (2011) meneliti pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah jamkesmas terhadap retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009. Penduduk merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berperan dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi. Penerimaan retribusi daerah baik dari retribusi yang bersumber dari kendaraan maupun retribusi yang bersumber dari

pasar diberlakukan oleh masyarakat, sehingga penduduk merupakan pelaku dari kegiatan perekonomian pada umumnya dan retribusi daerah pada khususnya. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat beriringan dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi (Putra, 2017). Kebutuhan masyarakat diperoleh melalui pasar sehingga dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan retribusi daerah. Peningkatan jumlah penduduk membawa pada meningkatkan jumlah kendaraan, karena dengan kendaraan memudahkan masyarakat untuk pergi berpindah tempat, sehingga dengan meningkatnya jumlah penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan akan kendaraan dan meningkatkan retribusi.

Wantara (2015) meneliti analisis jumlah kendaraan bermotor di daerah istimewa Yogyakarta (1990–2012). Berdasarkan hasil penelitian, jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kendaraan di daerah istimewa Yogyakarta. Masrofi (2004) meneliti potensi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap retribusi daerah, semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh jumlah kendaraan, jumlah pasar dan jumlah penduduk secara simultan terhadap retribusi daerah pada kabupaten kota Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh jumlah kendaraan, jumlah pasar dan jumlah penduduk secara parsial terhadap retribusi

daerah pada kabupaten kota Provinsi Bali, dan (3) menganalisis peran jumlah penduduk dalam memoderasi pengaruh jumlah kendaraan dan jumlah pasar terhadap retribusi daerah pada kabupaten kota Provinsi Bali

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, metode ini digunakan karena data yang terwujud merupakan data dalam bentuk angka. Selain itu pengolahan data dilakukan menggunakan analisis statistik. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono,2007:33) penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang berbentuk angka, data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah. Metode penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Lokasi penelitian ini terdapat di Provinsi Bali yang mencakup sembilan kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Data yang digunakan mencakup data regional yang berada di kabupaten/kota Provinsi Bali secara tahunan yang diambil dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu retribusi daerah, yang didukung dengan jumlah kendaraan, jumlah pasar dan jumlah penduduk pada kabupaten/kota Provinsi Bali.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif diperoleh melalui

keterangan mengenai data yang terkait dengan data jumlah kendaraan, jumlah pasar, retribusi dan jumlah penduduk serta retribusi daerah pada kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014 sampai dengan 2019. Data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berupa penjelasan–penjelasan atau uraian–uraian (Sugiyono, 2013), dan argumentasi untuk mendukung analisis data, seperti teori dan konsep mengenai jumlah kendaraan, jumlah pasar dan jumlah penduduk serta retribusi daerah pada kabupaten/kota Provinsi Bali. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali berupa data jumlah kendaraan, jumlah pasar, jumlah penduduk, dan retribusi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2014 sampai dengan 2019.

Jumlah pengamatan dalam penelitian ini ada pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2014 hingga 2019 (6 tahun), maka besarnya ukuran sampel adalah $9 \times 6 = 54$ pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series dan cross section* (data panel). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, yaitu pengumpulan data dengan mencatat secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, serta mempelajari uraian dari buku-buku, artikel, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan retribusi, jumlah kendaraan, jumlah pasar dan jumlah penduduk yang terdapat dari instansi terkait seperti BPS Provinsi Bali tahun 2011-2019. Analisis yang digunakan adalah

analisis regresi berganda dengan teknik analisis regresi moderasi atau *Regression Moderated Analysis (RMA)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda dengan Variabel Moderasi

Analisis regresi variabel moderasi atau *Regression Moderated Analysis (RMA)* digunakan untuk mengetahui dan memahami peran suatu variabel moderasi akan dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependent (Suyana Utama, 2012:147). Hasil analisis regresi dengan variabel moderasi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi dengan Variabel Moderasi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3408.720	22060.664		-.155	.878
	X1	283.426	54.309	3.287	5.219	.000
	X2	14.199	50.561	.058	.281	.780
	X3	-113.147	46.072	-.803	-2.456	.018
	X1*X3	-.234	.049	-2.590	-4.743	.000
	X2*X3	.139	.112	.551	1.235	.223

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 laporan output spss dan persamaan regresi berganda secara matematis adalah:

$$Y = -3408,720 + 283,426X_1 + 14,199X_2 - 113,147X_3 - 0,234X_1.X_3 + 0,139X_2.X_3$$

$$Se = (22060,664) \quad (54,309) \quad (50,561) \quad (46,072) \quad (0,049) \quad (0,112)$$

$$t_h = -0,155 \quad 5,219 \quad 0,281 \quad -2,456 \quad -4,743 \quad 1,235$$

$$Sig = 0,878 \quad 0,000 \quad 0,780 \quad 0,018 \quad 0,000 \quad 0,223$$

Keterangan:

b_0 = Konstanta

Y = Retribusi Daerah

X_1 = Jumlah kendaraan pada kabupaten/kota Provinsi Bali

- X_2 = Jumlah pasar pada kabupaten/kota Provinsi Bali
 X_3 = Jumlah penduduk pada kabupaten/kota Provinsi Bali
 b_1 = Koefisien regresi dari jumlah kendaraan (X_1)
 b_2 = Koefisien regresi dari jumlah pasar (X_2)
 b_3 = Koefisien regresi dari jumlah penduduk (X_3)
 b_4 = Koefisien regresi dari interaksi jumlah kendaraan dan jumlah penduduk (X_1X_3)
 b_5 = Koefisien regresi dari interaksi jumlah pasar dan jumlah penduduk (X_2X_3)
 e = Error

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan agar model regresi yang dijadikan estimasi tidak bias. Berikut ini merupakan asumsi klasik dalam penelitian ini, yaitu.

Uji ini dilakukan dengan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data distribusi normal, sebaliknya jika signifikansi $\leq 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal (Suyana, 2016). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.46023263
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.071
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp sig 2-tailed* uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas

Kolmogorov-smirnov, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Mendeteksi gejala multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai *tolerance* lebih dari 10 persen atau *VIF* kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.014	73.387
X2	.128	7.803
X3	.051	19.788
X1*X3	.018	55.170
X2*X3	.027	36.826

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 5, koefisien *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10. Hal ini berarti bahwa model regresi yang dibuat terdapat gejala multikolinearitas. Menurut Suyana Utama (2016;153) regresi dengan variabel interaksi umumnya akan menimbulkan masalah, karena akan terjadi multikolinearitas yang tinggi antara variabel independen dengan variabel interaksi, seperti pada variabel jumlah kendaraan (X_1) dan interaksi jumlah kendaraan dengan jumlah penduduk (X_1X_3), jumlah pasar (X_2) dan interaksi jumlah pasar dengan jumlah penduduk (X_2X_3). Hal ini disebabkan pada variabel moderasi terdapat unsur dari variabel independen dan variabel moderasi.

Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser. Metode Glejser ini adalah meregres variabel bebas

terhadap variabel absolut residual. Persamaan regresi dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika koefisien parameter variabel bebasnya tidak ada yang signifikan secara statistik, dengan tingkat kesalahan (α) sebesar 5 persen. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.752	5	.150	1.826	.125 ^b
	Residual	3.954	48	.082		
	Total	4.707	53			

a. Dependent Variable: ABSRES1

b. Predictors: (Constant), X2*X3, X1*X3, X2, X1, X3

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Hasil output SPSS pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 1,826 dengan nilai signifikansi sebesar 0,125 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas varian residualnya.

Uji Signifikansi

Uji Anova atau Uji F

Uji ini menggunakan F_{hitung} yang disajikan pada tabel anova pada Tabel 7.

Tabel 7 Uji Simultan atau Uji Anova atau Uji F Test

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38960349751.823	5	7792069950.365	27.404	.000 ^b
	Residual	13648561684.048	48	284345035.084		
	Total	52608911435.870	53			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2*X3, X2, X1*X3, X3, X1

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Dengan demikian berdasarkan Tabel 7 bahwa, F_{hitung} sebesar 27,404 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,37; atau $sig = 0,000$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel jumlah kendaraan, jumlah pasar, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap retribusi daerah pada kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014-2019.

Uji signifikansi koefisien beta regresi secara parsial.

Dalam uji ini digunakan uji t sesuai dengan output spss yang ditampilkan pada Tabel 3.

1) Pengaruh Jumlah Kendaraan Terhadap Retribusi Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual yang dilihat pada Tabel 3 kolom *Unstandardized Coefficients*, menunjukkan jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah, dimana koefisien jumlah kendaraan (X_1) bernilai 283,42 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah kendaraan meningkat sebesar seribu unit maka penerimaan retribusi daerah akan meningkat sebesar 283,42 milyar rupiah, dengan anggapan variabel lainnya konstan. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Itarini dan Wiwin Setyari (2019) yang menunjukkan bahwa jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah di Provinsi Bali.

Hubungan positif dan signifikan antara variabel jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah sesuai dengan penelitian Ratnowo (2008) dan Rosalina

(2015). Variabel jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah sangat responsif terhadap perubahan jumlah kendaraan bermotor. Variabel jumlah kendaraan memberikan dukungan bagi pos pungutan retribusi yang berhubungan dengan jumlah kendaraan, seperti retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat parkir dan retribusi ijin trayek. Setiap kendaraan yang sudah mengujikan kendaraannya dan melakukan pembayaran retribusi akan ditempelkan stiker pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan mengujikan kendaraannya. Peningkatan dari jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan mobilitas penduduk dalam melakukan aktivitas perekonomiannya sehingga dibutuhkan peningkatan pelayanan dan infrastruktur jasa terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ini memberikan indikasi yang baik bagi pemerintah Provinsi Bali dalam menggali potensi dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dapat dijadikan pemacu bagi pemerintahan daerah provinsi Bali untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan masyarakat terutama bagi ketersediaan obyek retribusi yang ada, sehingga penerimaan retribusi dapat dioptimalkan.

2) Pengaruh Jumlah Pasar Terhadap Retribusi Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual yang dilihat pada Tabel 3 kolom *Unstandardized Coefficients*, menunjukkan jumlah pasar berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap retribusi daerah dengan koefisien jumlah pasar (X_2) bernilai 14,19 dengan tingkat signifikansi 0,780 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa

apabila jumlah pasar meningkat sebesar 1 unit maka penerimaan retribusi daerah akan meningkat sebesar 14,19 milyar rupiah, dengan anggapan variabel lainnya konstan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pasar berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap retribusi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardana (2018) yang menyatakan bahwa jumlah pasar berpengaruh positif terhadap retribusi daerah Kabupaten Gunungkidul. Peningkatan jumlah pasar akan memberikan meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Parkir merupakan salah satu penerimaan retribusi daerah di pasar, rata-rata luas parkir di pasar menurut Hilmawan, dkk (2018) yaitu 84,00 m², rata-rata ruang parkir yang dibutuhkan untuk dapat menampung jumlah kendaraan di pasar yakni 14 SRP (Satuan Ruang Parkir) untuk sepeda motor, 3 SRP (Satuan Ruang Parkir) untuk mobil, dengan luasan minimal yang dibutuhkan adalah 58,50 m². Kendaraan yang datang ke pasar akan membutuhkan parkir, sehingga jumlah pasar yang meningkat akan dapat meningkatkan jumlah parkir serta diharapkan mampu meningkatkan retribusi daerah melalui parkir pasar.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan jumlah pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah. Penerimaan retribusi pasar dapat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pedagang yang ada di dalam pasar tersebut (Revolina & Yuliani, 2018). Berdasarkan penelitian Ratmoko & Yunita (2017) masih banyaknya pedagang yang belum taat administrasi pada setiap bulannya membayar retribusi dan pemerintah maupun melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis) pasar pernah memberikan surat peringatan kepada pedagang yang tidak taat administrasi namun hal tersebut

tidak pernah di tindak lanjut oleh pemerintah serta belum pernah memberikan sanksi terhadap pedagang-pedagang yang tidak taat administrasi tersebut dan selama ini pemerintah selalu memberikan kelonggaran kepada pedagang yang melanggar peraturan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan retribusi pasar hanya dikenakan kepada para pedagang yang berjualan di dalam pasar tersebut, baik pedagang yang berjualan di kios maupun los, namun apabila pedagang yang berjualan di pasar tidak membayar retribusi maka peningkatannya tidak akan mampu meningkatkan retribusi daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di daerah tersebut. Dengan banyaknya lapangan kerja yang ada maka akan banyak penduduk yang bekerja dan memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbelanja di pasar. Dengan demikian para pedagang akan mendapatkan keuntungan, sehingga dapat membayar retribusi pasar.

3) Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Retribusi Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual yang dilihat pada Tabel 3 kolom *Unstandardized Coefficients*, menunjukkan jumlah penduduk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah dengan koefisien jumlah penduduk (X_3) bernilai -113,14 dengan tingkat signifikansi 0,018 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05, artinya apabila variabel jumlah penduduk bertambah seribu orang dan variabel lain dianggap konstan, maka mengakibatkan retribusi daerah akan turun sebesar 113,14 milyar rupiah.

Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan SDM sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bhaskara Perwira Jaya & Widanta (2014) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Denpasar.

4) Pengaruh Jumlah Penduduk dalam Memoderasi Pengaruh Jumlah Kendaraan Terhadap Retribusi Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel 3 variabel jumlah kendaraan dengan nilai koefisien beta X_1 positif 283,42 dan tingkat signifikan 0,000 dan koefisien variabel interaksi X_1X_3 memiliki koefisien tidak positif sebesar -0,234 dan signifikan pada 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Hasil output interaksi jumlah kendaraan dengan jumlah penduduk menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memoderasi pengaruh jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan yang telah diungkapkan dalam teori bahwa dilihat dari apapun nilai β_2 (signifikan atau tidak, positif atau negatif) apabila β_4 signifikan berarti jumlah penduduk merupakan variabel moderasi.

Peningkatan jumlah penduduk memoderasi pengaruh jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah. Hal ini disebabkan karena kendaraan merupakan kebutuhan setiap orang. Hampir setiap orang akan menggunakan kendaraan untuk bepergian atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Penduduk berperan

dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Abdul Halim (2001) mengatakan bahwa besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk akan memperkuat pengaruh jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Syafruddin (2003) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tinggi dan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat, akan diikuti oleh pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya, sehingga memungkinkan penduduk dapat membeli kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor secara langsung mempengaruhi penerimaan retribusi daerah. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pande Ariasih, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah kendaraan sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan.

5) Peran Jumlah Penduduk dalam Memoderasi Pengaruh Jumlah Pasar Terhadap Retribusi Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dengan nilai koefisien -113,14 dan tingkat signifikan 0,018 dan koefisien variabel interaksi X_2X_3 memiliki koefisien yang positif sebesar 0,139 dan tidak signifikan pada 0,223 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Interaksi jumlah pasar dengan jumlah penduduk menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk

tidak mampu memoderasi pengaruh jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan yang telah diungkapkan dalam teori bahwa dilihat dari apapun nilai β_3 (signifikan atau tidak, positif atau negatif) asalkan β_5 signifikan berarti berarti jumlah penduduk merupakan variabel moderasi, namun karena β_5 dalam pengujiannya ditemukan tidak signifikan maka jumlah penduduk tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi.

Peningkatan jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh jumlah pasar terhadap retribusi daerah. Hal ini disebabkan karena tidak semua pedagang di pasar yang ada tertib membayar retribusi daerah tepat waktu (Ratmoko & Yunita (2017). Apabila pertumbuhan ekonomi sedang memburuk, maka perekonomian akan lesu. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai pendapatan sehingga akan menurunkan daya beli masyarakat. Turunnya daya beli masyarakat akan mengakibatkan rendahnya keinginan seseorang untuk ke pasar, sehingga pedagang di pasar tidak memperoleh keuntungan dari hasil dagangannya. Hal inilah yang mengakibatkan rendahnya kemampuan pedagang untuk membayar retribusi daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

- 1) Jumlah kendaraan, jumlah pasar, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah pada kabupaten/kota Provinsi Bali.

- 2) Jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah pada kabupaten/kota Provinsi Bali. Jumlah pasar berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah pada kabupaten/kota Provinsi Bali. Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah pada kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 3) Jumlah penduduk memoderasi pengaruh jumlah kendaraan terhadap penerimaan retribusi daerah pada kabupaten/kota Provinsi Bali, namun jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh jumlah pasar terhadap penerimaan retribusi daerah pada kabupaten/kota Provinsi Bali

SARAN

- 1) Menyediakan fasilitas seperti lahan parkir sehingga peningkatan jumlah pasar diikuti dengan ketersediaan tempat parkir sehingga dapat meningkatkan retribusi parkir.
- 2) Penerapan sanksi bagi pedagang yang tidak membayar retribusi harus didisiplinkan. Agar pedagang di pasar tidak seenaknya berjualan tanpa membayar retribusi tepat waktu. Perlu adanya pihak terkait yang datang ke pasar untuk meminta retribusi bagi para pedagang di pasar.
- 3) Pemerintah Provinsi Bali hendaknya lebih bersikap fokus didalam pengelolaan retribusi daerah agar dapat tercapai kemandirian keuangan daerah dan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan penerimaan retribusi daerah. Seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sebaiknya mengembangkan sumber-sumber penerimaan retribusi di daerahnya sesuai

dengan potensi-potensi yang ada di daerah Jembrana. Diperlukan adanya kajian dan evaluasi yang komprehensif dan kontribusi dari obyek-obyek retribusi yang ada sebagai bahan pertimbangan didalam penetapan tarif, penambahan obyek retribusi, dan juga penetapan target penerimaan retribusi di Provinsi Bali secara berkala, sehingga hasil penerimaan yang diperoleh dapat sesuai dengan yang diharapkan.

REFERENSI

- Asmuruf, Makdalena F. Rimate, Vikie A. dan Kawung, George MV. 2015. Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15 No. 05
- Bhaskara Perwira Jaya, Gde & Widanta. A.A Bagus Putu. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*. Vol 3 No 5 pp. 201-208
- Brahmana, Ida Bagus Agastya dan Sudiana, I Ketut. 2016. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015. *E-Jurnal EP Unud*, 5 [12]: 1384-1407
- Bratamanggala, Rudi. 2017. *Implications of Tax Receivables and Retribution for the Economic Growth of Indonesia. European Research Studies Journal*. Volume XX, Issue 3A, 2017
- Chatterjee, Santanu. 2005. *Capital Utilization, Economic Growth and Convergence. Journal of Economic Dynamics & Control*, 29, pp 2093-2124.
- Ekanayake. E.M and Aubrey E. Long. 2012. *Tourism Development and Economic Growth In Developing Countries. The International Journal of Business and Finance Research*, Volume 6, Number 1
- Faisal, Moh. 2017. Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas Parkir Dan Jumlah Kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Palu. *Katalogis*. Vol 5 No 4
- Fajrii, Muhammad dan Arman Delis,dkk. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di

- Sumatra. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], Agustus 2016. ISSN 2303-0186.
- Fitriana. (2014). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bontang. *E-journal ilmu pemerintahan*. 1(2).1875-1888.
- Ghosh, Partha Pratim, Arpita Dhar and Debesh Chakraborty. 2008. *Government Finances and Economic Growth: A Policy Perspective on the Developing Economy of Sri Lanka*. *Asia-Pacific Development Journal*, Vol. 15, No. 2.
- Gurluk, Serkan. 2009. *Economic Growth, Industrial Pollution and Human Development in the Mediterranean Region*. *Ecological Economics*, 68, pp 2327-2335.
- Hair, J. F., R. E. Anderson, R. L. Tatham, and W. C. Black. (1995). *Multivariate Data Analysis with Readings (Fourth Edition)*. New Jersey, USA : Prentice-Hall International, Inc.
- Herranz, Alfonso-Loncan. 2007. *Infrastructure Investment and Spanish Economic Growth, 1850-1935*. *Exploration In Economic History*, Vol. 44, pp 452-468.
- Ihlanfeldt, K. R. & Willardsen, K., 2014. *The millage rate offset and property tax revenue stability*. *Regional Science and Urban Economics*, May, Volume 46, pp. 167-176
- Irawan, Andi . 2015 *Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51: 1, 148-149.
- Itarini, Ni Made & Wiwin Setyari, Ni Putu. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Retribusi Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*. Vol 9 No 4
- Kaur, Manjinder dan Lakhwinder Singh. 2016. *Knowledge In The Economic Growth Of Developing Economies*. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*. Volume 8 Issue 2.
- Kurniawan, Robi & Managi, Shunsuke. 2018. *Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 54, No. 3, 2018: 339–361
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. *Economic Development and Cultural Change*. Chicago.

Vol 49. Hal : 1 – 21.

Murdo, Yuri. 2015. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol 5 No 4

Oates, W.E. 1972. *Fiscal Decentralization and Economic Development*. *National Tax Journal* 46.

Pande Ariasih, Ni Nyoman. Suyana Utama, I Made. & Wirathi, I G A P. 2019. Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB Dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. *E-Jurnal EP Unud*. Vol 8 No 3. Pp. 543-562

Permadi, Yudistira Andi. 2018. *Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 11 No. 2.

Pramartha, Agung Dan Aswitari, Luh Putu (2018) Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali. Vol 7 No 8: pp 1587-1825

Putri, M. E., dan Rahayu, S. (2015). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014). *e-Proceeding of Management*. 1(2). 281-288.

Revolina, Ellya & Yuliani. 2018. Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Lebong (Studi Terhadap Jumlah Pedagang dan Pertumbuhan Ekonomi). *Ekombis Review*. pp. 261-276

Rimbawan, Nyoman Dayuh .2012. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja Di Provinsi Bali. *PIRAMIDA*, Vol 6. Nomor 2

Rosalina, Elly. 2015. Analisis Pengaruh dan Kontribusi Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus. *Economics Development Analysis Journal*. Vol 4 No 1.

Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 1 Februari 2017.

Sinclair, M Thea. 1998, *Tourism and economic development: A survey*, *The Journal of Development Studies* 34.5

- Suartha, Nyoman dan Murjana Yasa I.Gst Wayan. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Februari 2017.
- Suartha, Nyoman. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan Dan Implementasi Kebijakan Penduduk Di Provinsi Bali. *Piramida*. Vol. XII No. 1 : 1 - 7
- Sunanto. (2015). Analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*. 1(2). 1-10.
- Suyatmo. 2011. Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Jamkesmas Terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009. *Digilib UNS*. Hal 93
- Syari, Dessy Dian dan Syamsurijal A K. 2017. *The Effect Of Fiscal Decentralization To Gross Domestic Regional Product Of District / City In South Sumatra Province*. *SIJDEB*, 1(2), 2017, 181-202
- Syafruddin, Faisal. 2003. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Taufik, Muhammad. 2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 7 No 2.
- Umberger, Wendy J. 2015. *Market-Channel Choices of Indonesian Potato Farmers: A Best–Worst Scaling Experiment*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 3, 2015: 461–77
- Uppun, Paulus. 2016. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan KB Dan Pengendalian Kelahiran Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Piramida*. Vol. XII No. 2 : 59 – 71
- Wantara, Agus. 2015. Analisis Jumlah Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (1990–2012). *Kinerja*. Vol 19 No 1
- Wardana, Dimas Kusuma. 2018. Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2016 (Studi Empiris DPPKAD). *Jurnal Ekobis Dewantara*. Vol. 1 No. 4